

## PENDAFTARAN CASN DAN PPPK Sukoharjo Butuh 800 Formasi

**SUKOHARJO (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo akan membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumuman dan waktu pendaftaran yang ditangani langsung pemerintah pusat, akan dijadwalkan 30 Mei secara online. "Total penerimaan diperkirakan lebih dari 800 formasi. Sekarang masih menunggu putusan dari pusat," kata Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Sukoharjo, Ahmad Fajar Romdhoni, Senin (24/5).

Menurutnya, proses pendaftaran sudah dilakukan daerah, dengan mengajukan formasi ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan mengingat tahapan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Seleksi CASN dan PPPK nantinya akan digelar sama seperti tahun lalu, menggunakan sistem online. Peserta akan mengikuti tes menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB) menyampaikan pengumuman, Pemkab Sukoharjo juga akan menyebarluaskan pengumuman tersebut ke masyarakat. Pemkab Sukoharjo juga akan menyampaikan formasi yang dibutuhkan, setelah mendapatkan kuota dari pemerintah pusat dalam penerimaan CASN dan PPPK nanti.

"Diperkirakan formasi untuk CASN sekitar 200 orang, selebihnya untuk formasi PPPK," kata Ahmad Fajar Romdhoni. Menurutnya, kebutuhan CASN dan PPPK di Kabupaten Sukoharjo tahun ini masih sama dengan tahun lalu, didominasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Hal itu dikarenakan kebutuhannya memang tinggi. (Mam)

## 215 Cakades Pati Dilantik

**PATI (KR)** - Bupati Pati Haryanto secara bertahap melantik 215 kepala desa hasil Pilkades serentak 10 April lalu, dengan protokol kesehatan ketat. Pelantikan dilakukan dilakukan empat sesi. Sabtu (23/5) dilantik 59 kades dari 6 kecamatan, sesi kedua dilantik 44 kades dari 5 kecamatan. Pelantikan sesi pertama Senin (24/5) diikuti 61 kades dari 5 kecamatan dan sesi kedua 51 kades juga dari 5 kecamatan.

Bupati Haryanto mengungkapkan, sebelumnya telah ditawarkan pelantikan secara virtual, tetapi mayoritas calon kades minta pelantikan secara langsung. "Karena masih pandemi Covid-19, akhirnya pelantikan dilakukan dalam empat sesi," jelasnya.

Bupati mengingatkan agar kades yang baru saja dilantik tidak mengadakan syukuran yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Bupati juga mengharapkan agar para kades mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan desa. Termasuk dalam menetapkan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rp 400 ribu. "Jika lebih dari itu, dapat dianggap sebagai pungutan liar," tegasnya. (Cuk)

## KEINGINAN MASYARAKAT CUKUP KUAT

# Temanggung Siap Laksanakan PTM

**TEMANGGUNG (KR)** - Sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan tatap muka (PTM) Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berbenah sambil menunggu instruksi dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan, jika Juli 2021 pemerintah memberlakukan PTM, Pemkab sudah siap melaksanakan.

Menurutnya, keinginan agar segera dilaksanakan PTM dari masyarakat cukup kuat. Karena itu, Bupati minta Satgas Penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan setempat terus melakukan persiapan

an-persiapan "Kami juga terus membahas berbagai persiapan pelaksanaan dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, jika Juli mendatang pemerintah memutuskan sekolah melaksanakan PTM, kami benar-benar sudah siap," tandas Al Khadziq.

Ditegaskan pula, sudah menjadi konsekuensi dari pemerintah daerah untuk

mempertimbangkan PTM. Di antara persiapan sarana-prasarana, persiapan guru, dan vaksinasinya.

"Kami sedang mengarah ke sana sambil menunggu regulasi-regulasi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun kementerian kesehatan, serta melihat kabupaten-kabupaten tetangga seperti apa," ungkap Bupati.



Al Khadziq

Dikatakan, semua pertimbangan akan dijadikan sebagai persiapan untuk

menuju pembukaan pendidikan tatap muka, sehingga pada tidak ada kluster dari pendidikan.

Menurut Al Khadziq, persediaan vaksin Covid-19 di Kabupaten Temanggung masih tercukupi, sesuai juklak yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

"Namun, kalau nanti akan membuka pendidikan tatap muka, tentu butuh persediaan vaksin yang lebih banyak lagi, karena semua guru maupun tenaga kependidikan nantinya harus divaksin," tandasnya. (Osy)

## BALIK KE PONPES LIRBOYO DAN GONTOR

# Karanganyar-Kendal Fasilitasi Ratusan Santri

**KARANGANYAR (KR)** - Dua santri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri asal Kabupaten Karanganyar tertunda masuk asrama karena hasil rapid swab antigen menunjukkan reaktif Covid-19.

"Semula mereka akan diberangkatkan bersama

91 santri lainnya. Namun karena dua santri terindikasi terjangkit Covid-19, hanya 91 yang diberangkatkan ke Ponpes Lirboyo Kediri," kata Sekretaris Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Karanganyar, Asy'ari Rofi'i.

Para santri asal Karang-

anyar diberangkatkan dari kompleks Pemkab setempat, menggunakan tiga bus. Dua santri yang reaktif saat dirapid tes antigen harus ditinggal dan dikarantina di rumah sampai sembuh diri.

Menurut Asy'ari, dari 93 santri yang akan berangkat ke Ponpes Lirboyo itu, 20 santri menjalani rapid tes mandiri, sedangkan lainnya difasilitasi Dinas Kesehatan Karanganyar.

"Dalam waktu dekat, 30 gas masih ada sekitar 30 santri dari Karanganyar yang akan diberangkatkan ke Ponpes Lirboyo," jelasnya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, Pemkab Karanganyar memfasilitasi tes cepat antigen terhadap santri dari Karanganyar yang akan masuk ke pesantren,

baik ponpes di Karanganyar maupun luar kota.

"Kita fasilitasi rapid test. Dinas Kesehatan Karanganyar yang melakukan rapid tes, supaya mereka ayem," ungkapnya usai melepas keberangkatan santri Ponpes Lirboyo Kediri.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto juga melepas 1.063 santri asal Kendal yang akan kembali ke Pondok Pesantren Lirboyo dan Gontor Jawa Timur. Terkait hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah melakukan rapid test terhadap para santri tersebut.

Menurut Dico M Ganinduto, rapid test gratis merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Kendal terhadap para santri.

Pihaknya juga ingin

memastikan kesehatan para santri setelah diketahui hasil test mereka. "Dengan demikian mereka akan aman kembali belajar, Kami juga berharap santri dari Kendal bisa menjadi contoh yang baik dan menjadi panutan dalam melaksanakan protokol kesehatan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Farinando RAD Bonay mengatakan, selain memfasilitasi rapid test gratis untuk 1.963 santri, Pemkab Kendal melalui BAZNAS setempat juga memfasilitasi armada keberangkatan para santri ke Ponpes Lirboyo dan Gontor. "Kami juga akan melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 di dua pondok pesantren tersebut," jelasnya. (Lim/Ung)



Bupati Kendal melepas keberangkatan para santri.

KR-Unggul Priambodo

# HUKUM

## DILEPAS DARI JERAT HUKUM PIDANA Pasutri Pengusaha Digugat Perdata

**YOGYA (KR)** - Setelah dibebaskan dari jerat hukuman pidana oleh majelis hakim PN Yogya dan PT Yogya dalam kasus jual beli rumah di Jalan Magelang, pasutri pengusaha Agus Artadi dan Yenny Indarto warga Jalan Magelang Cokrodiningrat Jatis Kota Yogya, kembali digugat secara perdata oleh pihak-pihak yang melaporkan mereka secara pidana yakni Julia dan Gemawan Wahyadhiatmika.

Pasutri tersebut dianggap melakukan perbuatan wanprestasi dan pengugat menuntut tergugat mengosongkan tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh penggugat. Sidang perkara perdata tersebut telah bergulir di PN Yogya dengan majelis hakim yang diketuai Suparman SH MH.

Kuasa hukum tergugat Oncan Poerba SH, Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH, menyampaikan eksepsi atau jawaban atas gugatan tersebut.

Menurut Oncan, Selasa (25/5), dalam eksepsi, uraian gugatan tersebut tak lengkap tentang berapa harga yang disepakati, bagaimana prosesnya secara lengkap, bagaimana cara penyerahan uangnya dan bagaimana dengan penyerahan harga jual belinya/harga pembayarannya, apakah sudah sepenuhnya pembayaran harganya diserahkan kepada para tergugat.

Bahkan dalam gugatannya para penggugat turut menggugat pihak lain, namun tidak dijelaskan bagaimana keterlibatan mereka.

Demikian pula, banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yang tidak diungkapkan dalam proses jual beli atas objek tanah bangunan tersebut, dimulai dari harga jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebenarnya sebesar Rp 6,5 miliar, perjanjian/Akta Jual Beli atas objek sedang dalam jaminan, penjaminan kembali objek tanah bangunan tersebut ke bank oleh para penggugat dan proses peralihan haknya menjadi atasnama para peng-

gugat, yang kesemuanya itu dilakukan secara bersamaan pada tanggal 27 September 2018.

Sedangkan dalam pokok perkara, Oncan menolak semua alasan gugatan para penggugat, karena apa yang dilakukan dalam akta jual beli dan perikatan, serta kuasa menjual tidak sesuai harganya dibuat Rp 3 miliar padahal yang benar sebesar Rp 6,5 miliar. Bahkan objek tanah dan bangunan sedang dalam jaminan di bank.

"Karena itu, tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam akta tersebut. Dan bahkan prosesnya dilakukan semuanya secara bersamaan pada tanggal 27 September 2018. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp 1,5 miliar tidak dibayar para penggugat kepada para tergugat, sekalipun objek tanah bangunan sudah balik nama menjadi atasnama para penggugat," tegas Oncan.

Untuk itu Agus dan Yenny melakukan gugatan balik. Dalam rekonsensi, Oncan menyebutkan sebagai akibat perbuatan dalam pokok perkara tersebut, perbuatan jual beli tersebut tidak sah dan batal secara hukum.

Sehingga hubungan jual beli tersebut harus diulang, dengan membuat kembali akta jual beli yang baru, serta para tergugat rekonsensi (Julia dan Gemawan Wahyadhiatmika) membayar kekurangan bayar sebesar Rp 1,5 miliar, ditambah ganti rugi sebesar 0,2% setiap hari sejak Tgl 27 September 2018 hingga sampai pembayaran lunas kepada para penggugat rekonsensi (Yenny Indarto dan Ir Agus Artadi).

Tak hanya itu, karena terbebas dari jerat pidana Agus dan Yenny telah melaporkan Julia dan Gemawan serta saksi Anton ke Polda DIY, karena memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana Laporan Polisi No LP-B/0369/V/2021/DIY/SPKT. (Zie)

## KEMISKINAN JADI LATAR BELAKANG

# Pasutri Edarkan Upal di Pasar

**BANTUL (KR)** - Polsek Jetis Bantul menetapkan pasangan suami istri (Pasutri) warga Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu (Upal). Dua tersangka yakni Hdp (25) dan Vdr (26), kini masih menjalani pemeriksaan.

Dalam kasus tersebut, Vdr dijerat Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2, ayat 3 UU RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Vdr yang membelanjakan uang palsu terancam pidana 10 atau 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar atau Rp 15 miliar. Sementara Hdp dijerat pasal yang sama dengan tambahan Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP dimana dirinya menyuruh melakukan atau turut serta dalam perbuatan itu dengan ancaman 10 atau 15 tahun penjara.

Kapolsek Jetis AKP Hatta Azharuddin Amrullah didampingi Kanit Reskrim Ipd Yuwana SH dan Kasubbag Humas Polres Bantul Iptu Sumaryata, Selasa (25/5), mengatakan kedua tersangka melan-

carkan aksi tersebutnya saat kejadian di rumah juga ikut digaruk. "Suaminya perannya menyimpan uang palsu, dia juga yang membeli melalui marketplace di Facebook seharga Rp 200 ribu," jelas Hatta.

Hdp mendapatkan uang palsu senilai Rp 500 ribu, pecahan 50 ribu sebanyak 9 lembar, 5 ribu sebanyak

saat kejadian di rumah juga ikut digaruk. "Suaminya perannya menyimpan uang palsu, dia juga yang membeli melalui marketplace di Facebook seharga Rp 200 ribu," jelas Hatta.

Hdp mendapatkan uang palsu senilai Rp 500 ribu, pecahan 50 ribu sebanyak 9 lembar, 5 ribu sebanyak



Kapolsek Jetis AKP Hatta Azharuddin Amrullah menunjukkan barang bukti.

KR-Sukro Riyadi

## Usai Merampok, Pelaku Kirim Pesan

**PURBALINGGA (KR)** - Kasus perampokan di Desa Karangklesem Purbalingga yang menimpa Munifah (75) pada Selasa (25/5), berbeda dengan lazimnya kasus serupa. Setelah melakukan aksinya, pelaku mengirimkan pesan ke melalui whatsapp dan Voice Note ke anak korban.

"Lucunya pelaku mengirimkan pesan ke grup WA keluarga korban menggunakan HP korban dan menyampaikan adanya perampokan," tutur Kasat Reskrim Polres Purbalingga, Iptu Gurbacov, Rabu (26/5).

Setelah menerima pesan itu, anak korban Muliah

Aryani (55) yang tinggal di Banjarsari Sumbang Banyumas, segera menelepon ayahnya.

Pelaku yang menguasai HP korban tidak mengangkat. Sebaliknya malah kembali menyampaikan pesan melalui voice note dengan kalimat *ini keluarga korban, tolong ini yang punya HP sedang kerampokan*.

Selain mengirimkan pesan melalui WA, lanjut Gurbacov, saat menyepak korban Munifah, pelaku juga menuntut korbannya membaca basmallah. Dalam melakukan penyekapan itu pelaku juga gemetar seperti ketakutan. "Pelaku berusaha mene-

ngankan korban, bahkan menyuruh korban membaca basmallah," ujar Kasat Reskrim.

Aksi perampokan kocak itu dialami keluarga Munifah. Tiga perampok mencongkel jendela ruang

tamu. Setelah mengikat dan menyekap penghuni rumah, kawanan itu membawa kabur perhiasan emas 1 ons, uang tunai dan telepon genggam. Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. (Rus)



Polisi melakukan olah TKP kasus perampokan di Karangklesem.

KR-Toto R